BERTAHANNYA BANGSAWAN LUWU (SUATU ANALISA BUDAYA POLITIK ORANG BUGIS)

THE PERSISTENCE OF LUWU NOBLESSE (AN ANALYSIS OF CULTURAL POLITICS OF BUGIS)

Rismawidiawati
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar
e-mail: rismawidiawati@gmail.com

Naskah Diterima: 30 Juni 2016 *Naskah Direvisi: 29 Juli 2016* *Naskah Disetujui: 25 Agustus 2016*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan alasan sehingga kelompok bangsawan Luwu masih dapat bertahan berdasarkan tinjauan budaya politik orang Bugis. Artikel ini disajikan secara deskriptif analitis melalui 4 (empat) tahapan metode penelitian sejarah, yaitu pengumpulan sumber (heuristic), kritik data atau sumber, interpretasi, dan historiografi. Selain itu, digunakan juga teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa budaya politik tradisional orang Bugis, yang dikenal dengan istilah siri' na pesse memberikan kontribusi penting terhadap bertahannya kelompok bangsawan Luwu. Budaya politik ini menghadirkan tokoh Tomanurung sebagai cikal bakal seluruh raja dan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di Kedatuan Luwu. Masyarakat Luwu mempercayai bahwa keturunan Tomanurung ditakdirkan untuk menjalankan pemerintahan. Bila yang memerintah bukan keturunan Tomanurung, masyarakat Luwu percaya bahwa akan terjadi suatu masalah di dalam negeri. Terlepas dari anggapan bahwa kehadiran Tomanurung ini adalah mitos dan merupakan rekayasa politik, keberadaan tokoh ini merupakan awal dari lahirnya para penguasa/raja. Keberadaaan Kedatuan Luwu yang masih ada sampai sekarang, walaupun fungsinya tidak sama lagi seperti di masa lalu, serta para elite yang didominasi oleh kaum bangsawan (andi) Luwu merupakan gambaran bahwa masyarakat masih tetap mempercayai akan kehadiran bangsawan sebagai tokoh yang ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Kata kunci: *Andi (bangsawan) Luwu, dan budaya politik Orang Bugis.*

Abstract

This article aims is to explain the reason of aristocratic group of Luwu still survive based on a review of political culture of the Bugis. This article presented in a descriptive analysis through the 4 (four) stages of historical research methods, namely the collection of resources (heuristic), criticism source of data, interpretation, and historiography. In addition, the technique of collecting data through interviews. The results found that the traditional political culture of the Bugis, known as siri 'na pesse make an important contribution to the survival of the aristocratic group of Luwu. This political culture present Tomanurung figure as a forerunner to the whole of kings and nobles in South Sulawesi included in Kedatuan Luwu. Luwu community believe that the descendants of Tomanurung destined to govern. If the ruling is not a descendant of Tomanurung, Luwu people believe that there will be a problem in the country. Apart from the assumption that the presence of this Tomanurung is a myth and as an invention of politics, the existences this character is the beginning of the birth of rulers / kings. The existence of Kedatuan Luwu which still exist today, although its function is not the same as in the past, as well as the elite dominated by the nobility (andi) Luwu is a picture that people still believe in the presence of royalty as the man who is destined to run the government.

Keywords*: Andi (nobles), Luwu, and political culture of Bugis.*

A. PENDAHULUAN

Fenomena menarik di Sulawesi Selatan bahwa pada setiap kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, baik itu sebagai bupati, walikota, ataupun level yang ada di bawahnya, camat dan kepala desa, keterlibatan kelompok bangsawan tidak dapat dinafikan lagi. Dalam pilkada langsung yang diadakan sejak tahun 2005, utamanya daerah-daerah yang kelompok bangsawannya sangat kental seperti Kabupaten Bone, Luwu, Wajo dan Soppeng, pesertanya hampir 70 persen adalah terdiri atas kelompok bangsawan. Keterlibatan kelompok bangsawan ini, mungkin karena dorongan dari partai pengusungnya, tetapi tidak jarang pula mereka ikut pilkada secara perorangan. Kepercayaan masyarakat dijadikan modal besar untuk meraih suara.

Reformasi membuka kembali ruang bagi semua kalangan masyarakat untuk berkontestasi di ranah politik termasuk pemilukada. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsawan untuk mendapatkan kekuasaan agar tetap *survive. Euforia* demokrasi dirasakan hingga masyarakat daerah yang tercermin hadirnya para elit lama yang muncul dan siap berkontestasi di pemilukada. Eksistensi kaum bangsawan dalam wilayah politik pemerintahan tercermin banyaknya *Andi* yang menjabat pada posisi strategis dalam struktur pemerintahan dan mendapatkan kedudukan di partai politik.

Suasana politik pada fase awal reformasi yang rumit memunculkan wacana hanya 'putra' daerah yang memiliki kesempatan untuk memimpin Luwu. Wacana inilah yang membuka ruang bagi para *Andi* yang notabene bangsawan dan 'putra' daerah untuk tampil di panggung politik khususnya pilkada.

Kedatuan Luwu kini telah berpecah-pecah menjadi beberapa kabupaten dan kota, yaitu: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu telah melakukan dua kali pilkada langsung yaitu tahun 2008 dan 2013. Sedangkan Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara telah lebih dahulu melakukan pilkada langsung yaitu 2005, 2010 dan 2015 ini. Fenomena menarik pada pilkada langsung ini yang keluar menjadi pemenang adalah dari golongan bangsawan.

Di Kabupaten Luwu, dengan adanya gelar simbolik yang dimiliki, serta wacana latar belakang dirinya yang merupakan keturunan Kahar Mudzakkar memudahkan Andi Mudzakkar untuk memimpin Luwu selama dua periode sejak 2008 sampai sekarang. Di Luwu Timur, dari tiga calon bupati yaitu, Muh. Thorieg Husler, Badaruddin AP dan M. Nur Husain, tak satu pun dari golongan *Andi* (bangsawan) pada pilkada 2015 ini. Namun, yang menarik adalah para calon bupati ini minta izin dan dukungan pada Datu Luwu, Andi Maradang Mackulau untuk maju pada pilkada Luwu Timur (www.luwuraya.com, 5 April 2015 dan www.beritakota-makassar. com, 25 Agustus 2015). Hal ini tentu saja mengandung makna politis di baliknya. Harapan bahwa keterlibatan Datu Luwu ini akan menarik masyarakat Luwu untuk memilihnya.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan 1945, Andi Djemma menyatakan bahwa dirinya berada di belakang kemerdekaan Republik Indonesia. Sejalan dengan pernyataannya itu, Datu Andi Djemma ketika itu menyerahkan Pajung Luwu ke tangan pemerintah daerah (Patang, 1975:221). Hal ini berarti bahwa sejak saat itu pemerintah daerah lah yang mempunyai tugas untuk melindungi dan mengayomi rakyat Luwu. Sedang posisi kedatuan dibiarkan terus bergulir untuk sekadar melanggengkan tradisi pergantian Datu Luwu. Meskipun konsep kerajaan sudah sirna seiring dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi kelompok bangsawan ini tetap eksis sampai sekarang. Bahkan mereka tetap mempertahankan kelembagaannya, meskipun itu tidak lagi berperan penting dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, para bangsawan kembali hadir menggali

dan menunjukkan identitas mereka. Bangsawan ini berusaha untuk menghidupkan kembali tata kehidupan yang bernuansa kerajaan di setiap daerah. Kelembagaannya tetap dilestarikan, dijaga, bahkan diupayakan dengan berbagai cara untuk membangun pencitraan. Keadaan yang demikian semakin memberi ruang yang lebih besar ketika didirikan apa yang dikenal dengan Perkumpulan Keraton Nusantara, yang dua tahun sekali mengadakan festival keraton dengan berbagai agenda acaranya.

Pertemuan yang dilakukan oleh para raja-raja se-Nusantara itu, memicu lahirnya beberapa kerajaan yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Terlepas dari itu semua, salah satu istana yang sekarang ini tetap bertahan sampai sekarang adalah Kedatuan Luwu. Kedatuan ini bukanlah merupakan perwujudan dari munculnya kerajaan sebagai saingan dari pemerintahan yang ada, tetapi kehadiran kedatuan ini menandakan bahwa rakyat masih menghendaki kehadirannya, meskipun dalam wujudnya sangat berbeda jika dibandingkan di masa lalu.

Kedatuan Luwu semacam satu lembaga yang tugas dan fungsinya sekarang ini, sangat berbeda di masa lalu. Di masa lalu, seorang yang bergelar datu hampir dapat dipastikan akan diangkat menjadi seorang raja atau lebih dikenal *payung* di Luwu. Akan tetapi kedatuan Luwu sekarang ini, selain sebagai satu bentuk untuk mempertahankan nilai-nilai 'budaya' yang mungkin masih ada dan dikhawatirkan punah, tetapi kehadiran kedatuan Luwu dapat dianggap perwujudan dari keinginan masyarakat untuk mendambakan seorang figur yang dianggap dapat mengayomi masyarakat, seperti halnya peranan yang dimainkan seorang raja di masa lalu.

Menurut Husain Syarif Ali (Wawancara, 4 Februari 2015), pada tahun 1980-an istana Datu Luwu masih dijadikan tempat berkumpul para anak muda tanah Luwu, tapi memasuki era 1990-an istana tampaknya tidak lagi diminati, hanya dijadikan objek wisata bagi kaum pendatang dan para peneliti yang ingin melihat-lihat isi istana. Selebihnya, pihak istana seakan tak memiliki aktivitas berarti selain datang sebagai tamu ketika upacara adat sedang digelar.

Kini, Kedatuan Luwu kembali bergeliat di bawah kepemimpinan Datu Luwu, Andi Maradang Mackulau. Berkat keaktifan Datu Luwu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, istana Luwu kembali diperhatikan. Datu Luwu sebagai *hulu* kaum bangsawan di Luwu tampil aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah melestarikan adat istiadat Luwu. Istana Luwu mulai ditata, Datu Luwu mulai dilibatkan pada persoalan-persoalan adat.

Menganalisis alasan bertahannya bangsawan di Luwu dari sisi budaya politik menjadi menarik dilakukan. Mengapa bangsawan Tana Luwu masih tetap dapat bertahan, barangkali karena berangkat dari budaya politik orang Bugis di Tana Luwu itu sendiri. Menurut Widjaja, perilaku politik ini berangkat dari budaya politik yang dimiliki oleh para aktor itu sendiri. Budaya politik yang dimaknai sebagai aspek politik dari sistem politik yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, mitos yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar suatu masyarakat merupakan faktor penentu perilaku politik itu sendiri (1988:250).

Fakta bahwa tetap dipertahankannya kedatuan Luwu saat ini mengandung makna bahwa datu masih memiliki tempat di hati masyarakat Luwu. Lebih luas lagi, gelar *Andi* yang bertahta di depan nama seseorang yang menandakan seseorang itu masih keturunan bangsawan di Luwu masih menjadi hal yang diperhitungkan. Hal ini tampak ketika pemilihan kepala daerah langsung di Luwu. Di sinilah *standingpoint* dari penelitian ini, untuk mencari tahu akar persoalan mengapa kelompok bangsawan ini masih tetap dapat bertahan?

Untuk mengetahui lebih dalam mengapa kedatuan Luwu ini masih tetap dapat bertahan, bahkan semakin mendapat

dukungan, perlu kiranya diketahui lebih jauh tentang budaya politik orang Bugis, utamanya Bugis yang ada di Luwu. Selain itu, perlu juga dilihat akar lahirnya kelompok bangsawan ini sebagai informasi awal untuk mengkaji mengapa kelompok bangsawan ini lahir dan dapat tetap bertahan.

Kajian tentang bangsawan Luwu bukanlah hal yang baru. Sudah banyak tulisan yang membahas persoalan ini. Sebut saja misalnya beberapa karya seperti *Luwu dalam Revolusi* karya Sanusi Daeng Mattata (1967), *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan* karya Sarita Pawiloy (1987), *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* karya Mattulada (1998), *Ensiklopedi Sejarah Luwu* karya Idwar Anwar (2005), *Kedatuan Luwu* karya Iwan Sumantri (editor) (2006), *Manusia Bugis* karya Christian Pelras (2006), dan yang terbaru *Pertarungan Elite Lokal di Bumi Batara Guru* karya Thamrin Mattulada (2014). Tulisan Thamrin Mattulada ini menyajikan sejarah politik lokal dan bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi proses serta hasil dari pemilihan kepala daerah langsung saat pertama kali diselenggarakan tahun 2005 di Kabupaten Luwu Timur. Tulisan ini menjadi acuan paling dekat dengan tulisan ini. Penulis berusaha menampilkan tulisan ini secara berbeda yaitu dengan menggunakan pisau analisis budaya politik orang Bugis. Juga, penulis tidak hanya terfokus di Kabupaten Luwu tapi berada pada skop Kedatuan Luwu. Kedatuan Luwu di sini mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, seperti layaknya tulisan sejarah lainnya. Ada empat langkah metode sejarah. *Pertama*, penelitian ini dimulai dari pencarian sumber sesuai dengan tema yang dikaji. Dalam pencarian sumber ini, selain buku-buku yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti, pencarian juga dilakukan untuk mendapatkan data-data dari *lontarak*, juga koran-koran lokal dan internet. *Lontarak* sangat membantu dalam merekonstruksi penulisan artikel ini, namun *lontarak* ini pun memiliki kelemahan sebagai sumber primer termasuk minim dalam hal waktu. Untuk itu kelemahan yang didapatkan dalam *lontarak* didapatkan dalam banyak sumber sekunder.

Untuk memeroleh sumber, penelitian dilakukan di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, tempat Istana Kedatuan Luwu berada, untuk mengumpulkan data-data sejarah dan bahan dokumenter lainnya yang tersimpan pada instansi pemerintah kabupaten, lembaga swasta, dan koleksi-koleksi pribadi. Selain itu, dilakukan pula penelitian terhadap tradisi-tradisi lisan atau cerita rakyat.

Tahap kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber. Ada dua jenis kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan sumber itu. Keabsahan itu dapat dilihat tentang tulisannya, kertas yang digunakan, ejaan yang digunakan. Kritik intern lebih pada isi yang dikandung oleh sumber-sumber tersebut. Penggunaan kritik sumber dilakukan jika ditemukan beberapa sumber yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Tahap ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi. Ada data yang masih lemah tetapi ada pula data yang cukup kuat, yaitu disebut dengan fakta. Data dan fakta ini kemudian dirangkai dalam satu tulisan untuk memberi penjelasan mengapa sesuatu itu terjadi. Persoalan yang dijawab tidak semata-mata tentang apa, siapa, kapan terjadinya, dan dimana kejadian itu terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengetahui mengapa hal itu terjadi.

Tahap akhir dalam metode sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Diakui bahwa dalam tahap akhir ini subjektivitas kadang muncul dari seorang penulis. Ada beberapa sebab mengapa hal itu dapat terjadi. Kekurangan sumber dan

kecenderungan ideologi penulis, semuanya itu dapat menyebabkan sesuatunya menjadi sangat subjektif. Hal-hal subjektif ini diupayakan ditekan sedapat mungkin untuk menghasilkan satu tulisan sejarah yang dapat dipandang objektif. Penguasaan metode dan metodologi sejarah menjadi kunci terwujudnya tulisan sejarah yang objektif.

Selain itu digunakan juga teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan kunci yang dipilih adalah keluarga dekat dari penulis yang merupakan warga lokal yang mendiami daerah tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama. Penulis juga merupakan warga setempat sehingga tidak begitu sulit bagi penulis kemudian menemukan informan selanjutnya, setelah informan kunci mengarahkan penulis mendatangi beberapa informan yang dianggapnya akan memberi informasi tentang bagaiman penjelasan mengenai bangsawan di Luwu. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau. Juga, dilakukan wawancara dengan dewan adat Kedatuan Luwu dalam hal ini Andi Baso Lolo yang telah menjadi Dewan Adat sejak tahun 2006; serta wawancara dengan masyarakat setempat untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap Kedatuan Luwu. Data-data wawancara kemudian dikuatkan dengan observasi atau sebaliknya fakta-fakta dalam pengamatan dikuatkan oleh wawancara.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Budaya Politik orang Bugis dan Lahirnya Kelompok Bangsawan

Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan merupakan pola perilaku masyarakat itu dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Selain itu, budaya politik dapat pula diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya (Eddy Utomo, http://pkn ips.blogspot.co.id diakses tanggal 15 Mei 2015).

Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika kita hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik; apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks pengembangan masyarakat secara umum, bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera. Dalam konteks inilah, tulisan ini tetap memanfaatkan perspektif budaya politik dalam melihat realitas mengapa kedatuan Luwu tetap berdiri sampai sekarang.

Pada konteks lokal, budaya politik pada dasarnya dipahami dari budaya politik Bugis Makassar sebagai nilai-nilai yang mendasari budaya politik tersebut. Nilai-nilai budaya politik tersebut merupakan kelanjutan dari berbagai gagasan dan aktivitas politik kerajaan-kerajaan di daerah Bugis Makassar dari dahulu sampai sekarang. Adapun nilai-nilai dan aktivitasnya dapat ditelusuri dari periode La Galigo,[1] periode Tomanurung,[2] periode

[1] Periode La Galigo diperkirakan berlangsung pada periode abad ke-11 dan ke-13 Masehi (Pelras, 2006:62). Dunia digambarkan terdiri atas langit (dunia atas) yang disebut *Botillangi'*; *Bumi* atau dunia tengah, yang disebutnya *lino*, dan dunia di bawah bumi, yaitu pertiwi yang disebutnya *Toddang -Tojang* atau *Urilliu'*.

[2] Periode Tomanurung adalah periode yang muncul setelah kerajaan Bugis-Makassar berada dalam keadaan "sianre bale tauwe". Periode ini dianggap sebagai tanda munculnya dan berkembangnya berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan yang berlangsung dari abad ke-14 sampai ke-16. Periode ini pulalah yang menandai lahirnya kaum bangsawan dan stratifikasi sosial lainnya di Sulawesi Selatan.

masuknya Islam[3], periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Wujud gagasan budaya politik Bugis Makassar dapat dilihat pada tradisi lisan dan sastra lisan yang termuat dalam nyanyian rakyat, puisi rakyat, mitos legenda dan fabel. Selain itu, juga terkandung pada pemikiran-pemikiran para *To Acca* (cerdik cendekiawan) di Sulawesi Selatan seperti *Kajaolalido* dari Bone, *Nene' Mallomo* dari Sidrap, *MaccaE ri Luwu* dan masih banyak lagi.

Menurut Mattulada dalam Latoa disebutkan bahwa, orang Bugis Makassar dalam kehidupan sehari-harinya masih terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang dianggap luhur dan keramat. Keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat itu disebut *pangngadereng*. *Pangngadereng* dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya manusia dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, dan menyebabkan adanya gerak (dinamik) masyarakat (Mattulada, 1985:58).

Sebelum menganut Islam, ada empat unsur *pangngadereng*, yaitu: *ade', bicara, rapang*, dan *wari'*. Keempat sistem adat normatif inilah yang berlaku di masyarakat. *Ade'* adalah komponen *pangngadereng* yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. *Bicara* adalah aturan-aturan peradilan dalam arti luas. *Rapang* adalah aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu atau membandingkan dengan keputusan adat yang berlaku di negeri tetangga. *Wari* adalah suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas kewenangan dalam masyarakat, membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan ruang lingkup penataan sistem kemasyarakatan, hak dan kewajiban setiap orang (Mursalim, www.bone-library.com, diakses tanggal 9 Juni 2015).

Setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, *sara'* menjadi unsur penggenap kelima dimana *sara'* ini berasal dari hukum-hukum agama Islam (Mattulada, 1985:382). Masuknya unsur *sara'* sebagai bagian dari *pangngadereng* menunjukkan bahwa *sara'* tidak mengubah nilai-nilai, kaidah-kaidah masyarakat, dan kebudayaan yang telah ada. Masuknya Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Bugis Makassar karena bermuara pada *siri'*. Hal ini tercakup dalam sebuah ungkapan di kalangan Bugis yang mengatakan:

"*siri emmi ri onroang ri lino, utettong ri ade'E, najagainnami siri'ta,*
nala siri'e sunge' naranreng nyawa na kira-kira".

Artinya:

Hanya untuk *siri'* kita hidup di dunia, saya taat kepada adat demi terjaganya atau terpeliharanya harga diri saya, adapun siri jiwa ganjarannya, nyawa rekaannya (Mattulada, 1985: 64-65).

Ungkapan di atas memiliki makna yang sangat dalam di kalangan Bugis. Dengan melaksanakan *pangngadereng*, berarti seorang Bugis sedang berusaha mencapai martabat hidup yang disebut dengan *siri'*. Menurut Mattulada (1985:108), *siri'* inilah yang mendorong orang Bugis sangat patuh terhadap *pangngadereng* karena *siri'* pada sebagian besar unsurnya dibangun oleh perasaan halus, emosi, dan sebagainya.

Pada budaya politik tradisional Bugis Makassar, dikenal istilah *siri' na pesse. Siri' na pessé* (Bugis) adalah sebuah konsep yang sangat menentukan dalam identitas orang Bugis dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Konsep *siri'* mengacu pada perasaan malu dan harga diri sedangkan *pessé* mengacu pada suatu kesadaran dan

[3] Periode Islamisasi di Sulawesi Selatan oleh banyak ahli sejarah dianggap mulai berlangsung pada abad ke-16. Di Tanah Luwu sendiri, Islamisasi dimulai pada tahun 1603, lebih awal dibanding Kerajaan Gowa.

perasaan empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.

Siri' dalam pengertian orang Bugis adalah menyangkut segala sesuatu yang paling peka dalam diri mereka, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata. *Siri'* bukan hanya berarti rasa malu seperti yang umumnya terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat suku lain. Istilah malu di sini menyangkut unsur yang hakiki dalam diri manusia Bugis yang telah dipelihara sejak mereka mengenal apa sesungguhnya arti hidup ini dan apa arti harga diri bagi seorang manusia (Abdullah, 1985:40-41). Begitu pentingnya *siri'* dalam kehidupan orang Bugis sehingga mereka beranggapan bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah hanya untuk menegakkan dan menjaga *siri'*.

Pada hakikatnya budaya *siri'* adalah produk kecerdasan lokal untuk membangun kembali tatanan sosial orang Bugis di masa lalu yang kacau balau. Secara historis, kondisi tersebut digambarkan dalam kronik-kronik Bugis dengan pernyataan bahwa kehidupan manusia pada masa itu bagaikan kehidupan ikan di laut, yang besar memangsa yang kecil atau disebut dengan *sianre bale tauwe.* Kondisi inilah yang kemudian menghadirkan tokoh *Tomanurung* sebagai cikal bakal seluruh raja dan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan.

Hampir semua raja pertama di semua kerajaan di Sulawesi Selatan, kecuali Wajo yang munculnya pada abad XV dan Tanete yang lahir pada abad XVI disebut *Tomanurung*. Pelbagai *lontarak* menggambarkan *tomanurung* sebagai berikut:

Nariaseng garek Tomanurung, nasabak tenrisseng apolongenna, tenrisseng to inanna amanna…

Artinya: Konon ia disebut orang *Tomanurung,* sebab tidak diketahui dari mana datangnya dan tidak diketahui pula ayah dan ibunya…. (Abidin, 1999: 19).

Tokoh *Tomanurung* inilah yang mewariskan munculnya kelompok bangsawan dalam sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Keturunannya, baik langsung maupun tidak langsung menjadi pewaris tahta. Setelah wafat yang menggantikannya adalah anaknya. Dalam perkembangan berikutnya, jika sekiranya seorang raja tidak memiliki anak, yang berhak menggantikannya adalh kemenakan, sepupu, bahkan jika mungkin adalah suami/istri atau cicitnya. Hal penting yang harus dipenuhi adalah darah bangsawan yang mengalir pada dirinya. Meskipun ada Dewan Adat yang menyeleksi dan melantik seorang raja,[4] namun kenyataannya, suksesi kepemimpinan tidak jauh dari tokoh utamanya, yaitu raja.[5]

Terlepas dari anggapan bahwa kehadiran *Tomanurung* ini adalah rekayasa politik, keberadaan tokoh ini merupakan awal dari lahirnya para penguasa/raja. Tokoh Karaeng Bayo, orang yang juga tidak diketahui asal usulnya, menikah dengan *Tomanurung* dari Kerajaan Gowa, seorang perempuan. Keturunan mereka inilah yang kemudian berkuasa turun temurun di Kerajaan Gowa. Demikian juga yang terjadi pada Kerajaan Bone, tokoh *Tomanurung* menikahi seorang perempuan yang juga dipercaya orang yang tidak diketahui asal usulnya. Kedua *Tomanurung* ini menikah dan menghasilkan enam orang anak. Keturunan mereka inilah yang kemudian memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Bone secara turun temurun. Di Kerajaan Luwu, *Tomanurung* di Luwu bernama Simpurusiang, kawin dengan Pattiajala, puteri yang muncul dari air. Dalam usahanya membangun jaringan, keturunan *Tomanurung* ini melakukan berbagai usaha. Cara yang digunakan di

[4] Di Kerajaan Bone dikenal dengan nama Dewan Adat Pitu, sedangkan di Kerajaan Gowa dikenal dengan nama Dewan Bate Salapang.

[5] Lihat silsilah Kekerabatan Raja-Raja di Sulawesi Selatan, koleksi Laboratorium Sejarah dan Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kerajaan Gowa adalah dengan melakukan penaklukan. Lain halnya dengan Kerajaan Bone. Perluasan wilayah dan kekuasaan, juga dilakukan dengan jalan pernikahan.

Kehadiran tokoh *Tomanurung* sebagai sosok yang mempunyai kelebihan, pada saat itu menjadi jawaban atas pertikaian yang terjadi pada masa itu. *Tomanurung* yang datang kemudian dilantik menjadi datu yang tidak boleh dibantah atau disanggah. Semua orang harus tunduk dan patuh kepada segala perintah dan kemauan datu. Orang yang berani menentang akan mendapat hukuman mati (Mattata, 1967:65).

Menjadi Datu di Kerajaan Luwu pada masa lalu adalah bukan hal yang mudah. Salah satu syarat seseorang bisa diangkat menjadi Datu adalah apabila ia bersedia miskin. Kabarnya di Luwu, seseorang yang akan dijadikan Datu terlebih dahulu diperiksa harta kekayaannya. Ketika selesai tugas kedatuannya, maka hartanya pun kembali dihitung. Biasanya Datu yang habis masa tugasnya tidak akan memiliki harta lebih daripada yang dimilikinya sebelum menjadi Datu (Mattulada, 1998:29).

Pada kebudayaan Luwu, bilamana datu hendak dikukuhkan menjadi *Pajung* (Datu yang memayungi Tana Luwu), ia harus melalui minggu latihan berat. Datu ditempatkan di sebidang lapangan terbuka, berpakaian sederhana, diberi makan jauh dari cukup. Ia tidak dilindungi dari hujan dan panas selama seminggu. Bila tidur hanya beralaskan pelepah atau sabut kelapa. Di sekeliling tempat itu, para anggota Luwu yang berjumlah 11 orang menjadi pengawas. Pelanggaran sedikit saja atau kurang dari sehari dari masa yang ditentukan, calon datu tersebut gagal dikukuhkan sebagai *pajung*. Maksudnya, supaya dapat merasakan, bagaimana kalau rakyat tidak mempunyai rumah, kekurangan makanan dan minuman sehingga kelak menjadi raja yang tidak sewenang-wenang.

Sesudah itu, harus tinggal di bilik lalu dibacakan buku-buku hukum adat sampai tamat. Setelah lulus, lalu dibawa ke Tana Bangkala untuk mengadakan perjanjian dengan rakyatnya. Hal ini pula lah yang dilakukan oleh Simpurusiang ketika ditasbihkan sebagai datu bagi rakyat Luwu.

"Engkau yang kami pertuan, engkau pulalah Datu Cina. Engkau selimuti kami agar tidak kedinginan. Engkau menjaga kami dari gangguan burung pipit agar padi kami tidak hampa. Engkau tidak akan mempermalukan. Engkau memanggil dan kami datang. Engkau menyuruh dan kami kerjakan, jikalau hal itu menjadikan engkau besar dan memuliakan kerajaan-mu"

Maka rakyat berteriak "Iyyo", lalu Simpurusiang menjawab:

"Jika demikian, aku memutuskan bahwa walaupun anak dan istriku, jikalau melakukan perbuatan yang tidak menghidupkan kalian dan tidak mulia, maka juga tidak akan menghidupkanku"

Perjanjian antara rakyat dan datu ini sudah menyangkut *siri'*. Memenuhi isi perjanjian adalah mutlak, melanggar hukum adat berarti melanggar *siri'*nya. Pada kepercayaan orang Bugis di masa lalu, *Tomanurung* ataupun raja dipandang memiliki *siri'* yang sempurna (Farid, 1992:228 – 230).

Bentuk kekuasaan datu (raja) ini kemudian berubah pada masa pemerintahan Datu ke-14, Etenrirawe atas anjuran *Toaccana Luwu*. Hukum Dasar Kerajaan Luwu di masa lalu dirumuskan antara lain:

1. *puwang temma bawangpawang*
   rajanya tidak menganiaya
   atau tenri bawangpawang
   rakyat tidak dianiaya
2. *puwang mapatutu*
   raja memelihara/memeriksa
   ata ripatutu
   rakyat dipelihara/diperiksa
3. *puang maddampeng*
   raja memaafkan

ata riaddempengeng
rakyat dimaafkan

4. *puang teppaleo-leo*
raja tidak mencela
ata tenrileoleo
rakyat tidak dicela
5. *puang temma tenni sulo*
raja tidak memegang suluh
Ata tenruattenni sulo
rakyat tidak dipegang suluh
6. *kalo luka bola*
parit menggeser rumah
bola luka taneng-taneng"
rumah menggeser tanaman

(sumber: Daeng Rapi, 1988:35)

Dasar hukum inilah yang kemudian berlaku di kedatuan Luwu dan menjadi pegangan tiap datu dan kabinetnya. Revolusi dasar hukum ini kemudian menyebabkan banyak anak raja yang dihukum terutama anak-anak raja yang jauh dari ibukota kerajaan karena melanggar dasar hukum ini (Mattata, 1967:69).

Dasar hukum ini pula yang menyebabkan, tidak ada jabatan dalam Kerajaan Bugis-Makassar manapun yang dianggap sebagai warisan mutlak, meski-pun tidak sedikit putra atau putri raja menjadi pewaris tahta orang tuanya. Tentu saja bahwa menjadi pewaris bukan hanya berdasarkan "darah" namun karena memang memiliki kemampuan.

Para pejabat dipilih oleh sebuah dewan pemilihan khusus berdasarkan berbagai kriteria seperti garis keturunan, hubungan dengan pejabat sebelumnya, kualitas pribadi, dan pengaruh yang dinilai dari jumlah dan kualitas pengikutnya, tanpa memperhitungkan di daerah mana dia tinggal.

Kualitas pribadi yang menjadi syarat bagi seseorang dapat mewarisi dan memegang kendali politik kedatuan adalah: memelihara kejujuran, selalu berkata benar, teguh pada pendirian yang benar, mawas diri, bermurah hati, memelihara sikap peramah, memelihara keberanian, dan tidak pilih kasih (Poelinggomang dalam Sumantri, 2006: 173 – 174).

Di Luwu, ketika Datu Luwu XV La Patiware Sultan Muhammad wafat pada 1615, ia digantikan oleh Patipasaung yang merupakan *anak mattola* urutan kedua. Padahal berdasarkan adat Luwu, seharus-nya putra pertama yang bernama Patiaraja yang menjadi Datu Luwu. Akan tetapi karena kekurangpatuhannya terhadap ajaran agama, dipilihlah adiknya menjadi Datu. Konon, Patiaraja ini suka mabuk-mabukkan dan judi sabung ayam (Idwar Anwar, 2005: 304 – 305). Darah bukanlah satu-satunya kualifikasi seseorang dapat diangkat menjadi Datu Luwu, namun juga kualitas pribadi menjadi penentu ditasbih-kannya seseorang itu sebagai Datu Luwu.

2. Bertahannya Kelompok Bangsawan di Luwu

Pada tahun 1905-1906, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Ada kekhawatiran bangsa barat lainnya, terutama bangsa Inggris, yang dianggap mencoba meluaskan wilayah pengaruh dan kekuasaannya. Peran yang dimainkan oleh James Brooke di Sabah dan Serawak, cukup mengkhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda. Usaha kerjasama yang dilakukan oleh James Brooke di pertengahan abad XIX di Kerajaan Bone, menjadi catatan bagi Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun penguasa Kerajaan Bone menolak kerjasama itu karena terikat kesepakatan yang telah dibuat dengan Pemerintah Hindia Belanda, tapi hal itu tidak mengurungkan niat Pemerintah Hindia Belanda untuk menaklukkan Sulawesi Selatan. Akhirnya pada tahun 1905 dilakukan serangan secara besar-besaran ke Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone menjadi incaran pertama.

Pemerintah Hindia Belanda yakin bahwa dengan menguasai Kerajaan Bone, seluruh kerajaan lainnya relatif lebih mudah dikuasai. Akhirnya pada tahun 1906, Kerajaan Bone takluk. Secara pelan

tapi pasti, akhirnya seluruh Sulawesi Selatan jatuh dan diduduki oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan sistem pemerintahan modern.

Selama menjalankan kekuasaannya, sejak Perjanjian Bungaya 1667, sampai awal abad XX, Belanda menganggap bahwa para bangsawanlah yang menyengsarakan rakyatnya. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para bangsawan, oleh penjajah dianggap sebagai salah satu faktor utama kesengsaraan rakyat. Oleh karena itu, ketika mereka berhasil menguasai seluruh Sulawesi Selatan, hal pertama yang dilakukan adalah menurunkan rajanya, dan menghilangkan seluruh jabatan-jabatan penting dalam istana. Bahkan dewan adat juga dibekukan. Semuanya ini dilakukan untuk mengurangi ruang gerak para bangsawan.

Setelah berhasil menguasai Kerajaan Bone dan Gowa, sasaran berikutnya adalah Kerajaan Luwu. Pada awalnya kedatangan mereka mendapat tantangan dari penguasa Kerajaan Luwu, ketika itu raja yang berkuasa adalah We Kambo. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memaksakan kekuasaannya dengan Pernyataan Pendek (*koerte verklaring*). Dalam pernyataan itu, pihak penguasa pribumi harus mematuhi beberapa ketentuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan itu isinya adalah: bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Belanda dan tunduk pada Ratu Belanda.

1. Menaati semua peraturan dan perintah Gubernemen.
2. Tidak dapat mengadakan perjanjian dengan kekuasaan atau negara lain (Pawiloy, 1987:44-46).

Dalam perkembangannya kemudian, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27 April 1916, No. 49, yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara (*staatblad*) 1916, No. 352, telah ditetapkan Afdeling Luwu dibagi dalam 6 *onderafdeling*, yaitu Palopo, Rantepao, Makale, Masamba, Malili, dan Kolaka.[6]

Dalam menata sistem pemerintahan, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, mereka mencoba untuk memisahkan para bangsawan dengan rakyat. Selain memenjarakan mereka yang dianggap tidak bersahabat atau tidak mau bekerjasama, banyak juga bangsawan yang dipindahkan ke tempat lain. Agar kekuasaan bangsawan yang secara tradisional telah menyatu di tempat mereka berada, Pemerintah Hindia Belanda memindahkan mereka ke tempat lain. Tujuannya agar kekuasaan para bangsawan ini menjadi melemah.

Persoalan baru muncul karena para kepala kampung atau *wanua,* kadang tidak dapat bertindak atau menjalankan tugasnya karena berhadapan dengan bangsawan yang lebih tinggi status atau kedudukannya. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dijalankan dengan baik. Para penguasa pribumi yang diangkat untuk menjalankan tugasnya, kebanyakan terbengkalai karena adanya rasa risih, sungkan, dan bahkan merasa malu, karena munculnya bangsawan yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Masyarakat masih percaya bahwa mereka yang memiliki darah bangsawan yang tinggilah yang seharusnya memerintah atau berkuasa.

Pemerintah Hindia Belanda kurang menyadari arti peran yang dimainkan oleh para bangsawan selama ini. Hak-hak istimewa yang didapatkan oleh kalangan bangsawan adalah sesuatu yang dianggap oleh para masyarakat adalah sesuatu yang '*given'*, artinya masyarakat melihat itu sesuatu yang sah dan tidak dapat dipersoalkan. Rakyat percaya bahwa

[6] Pada tahun 1940, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Timur Besar (*Gouvernement van Grote Oost*), tertanggal 24 Februari 1940 (Lembaran Negara 1940, No, 21), *onderafdeling* Makale dan *onderafdeling* Rantepao disatukan menjadi satu *onderafdeling* yang dikenal dengan *onderafdeling* Makala-Rantepao.

mereka adalah kelompok yang ditakdirkan untuk memerintah.

Kepercayaan masyarakat itu didasarkan atas apa yang selama ini mereka dapatkan dari kelompok bangsawan tersebut. Antara keduanya, ada hubungan yang lebih dalam. Ada hubungan *patron-client*. Pada negara-negara yang masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang prismatik (transisi),[7] hubungan *patron-client* masih tetap hidup dengan subur. Hubungan *patron-client* biasanya masih dapat bertahan pada daerah-daerah yang masyarakatnya masih memegang norma-norma lama. Masyarakat Luwu yang masih sangat menghargai norma-norma tradisional memberi tempat yang subur pada hubungan *patron-client* ini. Hubungan ini tidak saja diperkukuh oleh pemerintah yang melihat bahwa hubungan itu dapat memberi konstribusi yang besar dalam skala nasional demi untuk menciptakan suatu kondisi yang stabil. Tetapi hal itu memberi keuntungan pada birokrat yang ada di daerah. Elite bangsawan Luwu yang memegang posisi-posisi primer di daerah, dengan kekuasaan tradisional yang masih dimilikinya mungkin saja tanpa kesulitan dapat menjadi agen pembaharuan di daerah sesuai dengan program pemerintah.[8] Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda kembali mengangkat raja. Pada tahun 1931, raja Bone Andi Mappanyukki diangkat menjadi raja di Kerajaan Bone, dan Andi Idjo diangkat menjadi raja di Kerajaan Gowa pada tahun 1938.

Secara tidak langsung memindahkan kelompok-kelompok bangsawan pada tempat-tempat yang jauh dari daerahnya, tidaklah berarti bahwa mereka kemudian tidak dihargai di tempat baru mereka. Di tempat baru inilah mereka kemudian menikah dan melahirkan darah-darah bangsawan, meskipun derajatnya tidak lagi setara. Seorang bangsawan laki-laki yang menikah dengan rakyat biasa, anak yang lahir dari perkawinan itu tetap digolongkan pada golongan bangsawan, meskipun derajatnya menurun. Keadaan ini membuat terjadi penyebaran darah bangsawan pada banyak daerah. Mereka menyebar pada hampir seluruh pelosok. Darah bangsawan tidak saja menyebar di pusat kekuasaan, tetapi menyebar pula di hampir pelosok-pelosok daerah. Hal inilah yang mungkin membuat mereka yang berdarah bangsawan memiliki jaringan yang demikian luas di banyak daerah.

Keadaan yang hampir sama terjadi di era revolusi kemerdekaan. Kelompok bangsawan dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan dalam banyak sektor. Andi Mappanyukki misalnya diangkat sebagai ketua organisasi Sudara. Demikian juga Andi Abdullah Bau Massepe dan Andi Makkasau, menjadi pelopor dalam pendirian organisasi PNI yang kemudian berubah menjadi PPNI. Lanto Daeng Pasewang dan Pajonga Daeng Ngalle, adalah dua pimpinan kelaskaran yang berasal dari kalangan bangsawan. Keterlibatan mereka, tidak saja menggairahkan para pemuda, tetapi secara langsung maupun tidak langsung, menggerakkan seluruh masyarakat. Kepercayaan mereka pada golongan bangsawan cukup tinggi dan mereka ini sangat dihormati. Perintah mereka dituruti.

Pada waktu Ratulangi dipandang sangat lemah karena khawatir dianggap sebagai kolabolator oleh Belanda, pihak raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan melakukan pertemuan. Rumah Andi Mappanyukki dijadikan sebagai tempat pertemuan. Dalam pertemuan itu mereka menyepakati untuk mendukung penuh Ratulangi.

---

[7] Kata "transisi" itu sendiri menunjuk pada suatu tahapan waktu antara suatu masa lalu tertentu dan suatu keadaan di masa depan yang dapat diramalkan, dengan kata lain masyarakat transisi adalah masyarakat yang berada atau yang sedang beranjak dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

[8] Mengenai hubungan *patron-client* di Sulawesi Selatan, baca buku Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988).

Di kalangan masyarakat Bugis-Makassar (termasuk Mandar dan Toraja), mereka percaya bahwa para bangsawanlah yang berhak untuk memerintah. Oleh karena itu, ketika kepala kampung atau distrik yang menjalankan tugasnya berhadapan dengan rakyatnya yang memiliki darah yang lebih murni atau status kebangsawanannya jauh lebih tinggi dari dirinya, mereka merasa sesuatu yang tidak pantas. Dalam keadaan yang demikian ini, salah satu jalan yang ditempuh oleh kepala kampung atau distrik adalah bersikap masa bodoh dengan apa yang dihadapinya.

Oleh karena itu penataan administrasi pemerintahan pada awalnya tidak berjalan baik. Pemerintah Hindia Belanda masih diperhadapkan pada banyak macam masalah. Pada tahun 1916 Pemerintah Hindia Belanda mulai melangkah pada penataan yang lebih jelas. Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk memperkuat daerah *borik* atau *wanua*, yaitu bagian kekuasaan terkecil yang merupakan bagian dari satu kesatuan pemerintahan bumiputra.

Sistem yang diterapkan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal yang demikian ini pun sudah ada jauh sebelumnya, sebelum munculnya kerajaan di daerah ini. Namun, dengan penerapan ini Pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk menafikan bahwa para bangsawan yang berdarah *tomanurung* yang telah memiliki akar dan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Memperkuat *borik* atau *wanua*, berarti pula mengenyampingkan peran dan fungsi para bangsawan. Peran dan fungsi bangsawan tampaknya diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini adalah seorang Kontrolir dan juga Residen yang sebelumnya berada di tangan raja.

Pengambilalihan peran dan fungsi raja ini tidak serta merta pengalihan kepatuhan dari raja ke kontrolir atau residen. Hubungan antara raja dengan kepala wanua telah dibina sedemikian lama, sehingga pengenalan hal yang baru membuat mereka serba salah. Rakyat Luwu masih memegang kepercayaan lama bahwa pimpinan mereka adalah raja, yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Memasuki periode kemerdekaan, kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta disambut gembira oleh rakyat dan raja-raja di Sulawesi Selatan, sebut saja Arumpone Andi Mappanyukki dan Datu Luwu Andi Djemma. Pada masa itu, Andi Djemma menyatakan Kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah Kesatuan republik Indonesia. Dia dengan sukarela meleburkan kerajaannya ke dalam republik dan menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi pada kontinuitas nilai-nilai budaya politik Bugis Makassar.

"Rasionalisasi" sistem pemerintahan yang diterapkan pemerintah kolonial dimana kaum bangsawan tetap diberi kekuasaan, meskipun berbeda dengan kekuasaan mereka sebelum 1905 tetap berlaku di Sulawesi Selatan bahkan hingga dibubarkannya Negara Indonesia Timur. Bekas *onderafdeling*, yang diubah namanya menjadi *swapraja* "wilayah otonom" yang dibagi menjadi wanua, hingga 1960 masih dipimpin oleh para bangsawan (Pelras, 2006:339).

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di Kota Palopo (Mastil Andi Bintang, www.academia.edu diakses tanggal 10 Mei 2015).

Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1957 tentang pengha-

pusan sistem pemerintahan Swapraja dan terpisahnya Tana Toraja dari Kab. Luwu, praktis sistem pemerintahan swapraja menjadi dihapus, disertai berakhirnya pula pemerintahan sistem kerajaan Luwu. Datu Luwu Andi Djemma langsung menjadi Bupati / Datu Luwu kala itu.

Undang-undang ini akhirnya menguburkan semua sisa-sisa sistem pemerintahan masa lampau di Sulawesi Selatan, seperti di tempat lain di Indonesia. Dengan berlakunya UU. 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi sistem pemerintahan Swatantra dihapus. Pada waktu itu wilayah Kab. Dati II Luwu di bentuk 16 Kecamatan dan salah satu di antaranya adalah Kecamatan Bajo dengan ibukotanya Belopa, sesuai keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: 2067 A Tahun 1961 Tanggal 19 Desember 1961.

Oleh karena Belopa mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, Belopa ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1983, pada perkembangan berikutnya dibentuk pembantu Bupati wilayah III yang berkedudukan di Belopa pada Tahun 1993.

Sebagai konsekuensi logis lahirnya Undang-Undang nomor: 12 Tahun 1999, sebagai tanda pelaksanaan otonomi daerah, mekarlah Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba berdasarkan Undang-Undang nomor: 13 Tahun1999. Bahkan sesudah itu Kota Palopo sebagai ibukota Kabupaten Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom, dengan lahirnya Undang-Undang nomor: 11 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Palopo berfungsi ganda di samping sebagai ibukota induk (Kabupaten Luwu) juga sebagai ibukota otonom Palopo hasil pemekaran. Dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diupayakan pemindahan ibukota Kabupaten Luwu dari Palopo ke Belopa. Pada tanggal 30 Desember 2005, peraturan pemerintah tentang pemindahan ibukota Kab. Luwu dari Kota Palopo ke Kota Belopa, Kabupaten Luwu, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan nomor: 80 Tahun 2005 akhirnya pada tanggal 13 Februari 2006 Kota Belopa diresmikan jadi ibu kota Kabupaten Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana masyarakat terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya maka untuk pertama kalinya Kabupaten Luwu menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung pada tahun 2008. Sebagai daerah yang secara historis terbangun dari periodisasi kerajaan yang sangat kuat, masyarakat Luwu kebanyakan masih sangat feodal. Pembagian stratifikasi sosial antara bangsawan dan bukan bangsawan atau *ata* (hamba sahaya) masih sangat kental. Sekaligus secara sosiologis, dimana ada kelompok elit kultur yang dominan dan berkuasa serta relatif mendapat akses politik lebih besar.

Pilkada langsung ini dimanfaatkan oleh Andi Mudzakkar yang maju mencalonkan diri. Rivalnya, Basmin Mattayang merupakan *incumbent* karena masih memiliki *power* di birokrasi. Basmin pun tidak terlalu sulit untuk mengendarai partai besar. Hal ini disebabkan Basmin adalah Ketua DPD Partai Golkar Luwu di masa itu. Basmin sendiri merangkul Buhari Kahar Muzakkar yang tak lain adalah kakak kandung Andi Mudzakkar, sebagai 02-nya. Pilkada Luwu 2008 sendiri diikuti empat kontestan.

Ketika proses pencalonan diri Andi Mudzakkar, wacana kampanye yang dimunculkan adalah latar belakang dirinya yang merupakan keturunan Kahar Mudzakkar. Dia ingin mengukuhkan bahwa ada internalisasi kepemimpinan yang menurun kepadanya, dan dialah titisan pemimpin yang pantas dipilih karena memiliki relasi historis sebagai darah pejuang dan pemimpin.

Menyingkirkan Basmin dan lawan-lawan politiknya yang relatif memiliki popularitas dan pengalaman politik memang bukanlah hal mudah bagi Andi Mudzakkar. Namun historis keluarga dan latar belakang kebangsawanan yang disandangnya mampu mendongkrak minat rakyat dalam memilihnya sebagai bupati. Alhasil, pada pesta demokrasi langsung yang pertama ini, Andi Mudzakkar berhasil merebut kursi Bupati Luwu 2008 – 2013. Andi Mudzakkar menang dengan 83.058 suara, sementara Basmin 57.977 suara. Kemenangan yang cukup telak.

Di Luwu Utara sendiri, pilkada langsung telah dimulai sejak tahun 2005 seiring terbitnya undang-undang otonomi daerah. Di Luwu Utara pun, Andi Luthfi yang merupakan penggagas mekarnya Luwu Utara dapat dipastikan terpilih menjadi Bupati Luwu Utara. Andi Luthfi menjabat sampai dua periode kemudian.

Di Luwu Timur, hingga berakhirnya pendaftaran peserta konvensi calon bupati partai Golkar yaitu tanggal 5 Mei 2005, hanya satu calon yang mendaftarkan diri ikut bersaing dalam perebutan kursi calon bupati yakni A. Hatta Marakarma. Hal ini bukan tanpa alasan, A. Hatta Marakarma adalah kemenakan dari A. Hasan Opu Toputtiri yang notabene adalah ketua DPRD sekaligus ketua partai Golkar ketika itu (Mattulada, 2014:46-47). Pada 2005, tercatat ada empat bakal calon bupati namun hanya Andi Hatta Marakarma yang keturunan bangsawan, sehingga dapat dipastikan bahwa Andi Hatta Marakarma terpilih menjadi Bupati Luwu Utara 2005 – 2009. Berikutnya pun masih dipercaya oleh rakyat kembali untuk memimpin Luwu Utara periode 2010 – 2015.

Menurut H.S. Ahimsa (1981:88), pada masyarakat Sulawesi Selatan sistem hirarki tersebut ditentukan oleh perbedaan kontrol atas kedudukan/status, kekuasaan dan kekayaan. Hal ini dimaksudkan bahwa pengakuan dari masyarakat atau perorangan kepada seseorang ditentukan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri orang tersebut. Dilihat dari kedudukan, kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki seseorang sehingga mampu membawa dirinya kepada pengakuan masyarakat sebagai orang yang disegani dan bahkan dengan perbedaan itu juga dapat mengangkat seseorang untuk menjadi sang pemimpin.

Warisan kerajaan masa lampau yang masih berpengaruh di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Luwu pada khususnya, hingga sekarang adalah pengaruh bangsawan di bidang sosial politik. Bangsawan bugis yang bergelar 'Andi' secara historis memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Keluarga bangsawan ini umumnya memiliki tanah yang cukup luas serta banyak bekerja sebagai pegawai pemerintah dan politisi. Dalam struktur stratifikasi sosial, mereka tergolong kelompok elit bersama-sama dengan para profesional, pengusaha, intelektual, agamawan, dan sebagainya. Dalam konteks kekinian, bangsawan tersebut masih memainkan peran sebagai *patron* dengan memelihara hubungan dengan para pengikutnya *(client)*.

Patron dan *client* dalam budaya dan relasi sosial meluas masuk ke ranah politik. Kaum bangsawan selain memiliki kharisma di masyarakat juga mudah diterima pendapat dan keputusan politiknya. Masyarakat biasa bahkan merasa terhormat jika membangun relasi personal dengan bangsawan tersebut.

D. PENUTUP

Budaya politik tradisional orang Bugis yang dikenal dengan istilah *siri' na pesse* memberikan kontribusi penting akan bertahannya kelompok bangsawan Luwu. Budaya politik *siri' na pesse* inilah kemudian yang akhirnya menghadirkan tokoh *Tomanurung* sebagai cikal bakal seluruh raja dan bangsawan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk di Kedatuan Luwu.

Terlepas dari anggapan bahwa kehadiran *Tomanurung* ini adalah mitos dan rekayasa politik, keberadaan tokoh ini merupakan awal dari lahirnya para

penguasa/raja. Keturunan mereka inilah yang kemudian berkuasa turun temurun di Kerajaan Luwu. Mereka dipercayai ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Bila yang berkuasa bukan keturunan *Tomanurung* maka masyarakat percaya bahwa akan terjadi masalah di dalam negeri.

Keberadaaan Kedatuan Luwu yang masih ada sampai sekarang, walaupun fungsinya tidak sama lagi seperti di masa lalu, serta para elit yang didominasi oleh kaum bangsawan (*andi*) di Luwu merupakan satu gambaran bahwa masyarakat masih tetap memercayai akan kehadiran bangsawan sebagai tokoh yang ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

DAFTAR SUMBER

1. Buku

Abdullah, Hamid. 1985.
Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Histori terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar. Jakarta: Inti Idayu Press.

Abidin, A. Zainal. 1985.
Wajo Pada Abad XV--XVI; Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara. Bandung: Alumni.

Ahimsa, Heddy Shri. 1988.
Minawang, Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anwar, Idwar. 2005.
Ensiklopedi Sejarah Luwu. Palopo: Komunitas Kampung Sawerigading (KAMPUS) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kab. Luwu, Pemerintah kab. Luwu Utara dan Pemerintah kab. Luwu Timur.

Daeng Mattata, Sanusi. 1967.
Luwu dalam Revolusi. Ujung Pandang: Bakti Baru.

Daeng Rapi, Ahmad Massiara. 1988.
Menyingkap Tabir Sejarah Budaya di Sulawesi Selatan. Makassar: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.

Mattulada. 1998.
Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.

Mattulada, Thamrin. 2014.
Pertarungan Elite Lokal di Bumi Batara Guru. Makassar: Pustaka Sawerigading bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar.

Patang, Lahadjdji. 1975.
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia: Sulawesi dan Pahlawan2nya. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia (YKGMI).

Pawiloy, Sarita. 1987.
Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan. Makassar: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Sulawesi Selatan.

Pelras, Christian. 2006.
Manusia Bugis. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta–Paris EFEO.

Sumantri, Iwan (editor). 2006.
Kedatuan Luwu edisi kedua: Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi. Makassar: Jendela Dunia bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Luwu Timur dan Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Widjaja, Albert. 1988.
Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

2. Internet

Eddy Utomo. *Pengertian Budaya Politik,* diakses dari http://pkn ips.blogspot.co.id tanggal 15 Mei 2015.

Mastil Andibintang. *Asal Usul Luwu,* diakses dari www.academia.edu tanggal 10 Mei 2015.

Mursalim *Konsep Pancanorma atau Konsep Pangngadereng*, diakses dari www.bone library.com, tanggal 9 Juni 2015.

Diakses dari www.luwuraya.com, tanggal 5 April 2015.

Diakses dari www.beritakota-makassar.com, tanggal 25 Agustus 2015.